

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam organisasi untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam pengertian praktis sehari-hari, sumber daya manusia lebih dimengerti sebagai bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi.

Sumber daya manusia yang kompeten dan yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk mendukung produktivitas dan aktivitas agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan sempurna. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global.

Dalam pendidikan, guru merupakan salah satu komponen yang sangat penting, selain komponen lainnya seperti tujuan, kurikulum, metode, sarana dan prasarana, lingkungan, dan evaluasi. Dianggap sebagai komponen yang paling penting karena yang mampu memahami,

mendalami, melaksanakan dan akhirnya mencapai tujuan pendidikan adalah guru. Jika guru gagal dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah, maka juga akan gagal dalam proses pembentukan sumber daya manusia yang kompeten.

Guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan.¹ Profesi guru adalah sangat penting, sebab mutu guru turut menentukan mutu pendidikan. Sedangkan mutu pendidikan akan menentukan mutu generasi muda, sebagai calon warga negara dan warga masyarakat.

Menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 1, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.²

Untuk itu, dibutuhkan guru yang bermutu sehingga tercapai sistem pendidikan yang berkualitas. Profesionalisme dalam pendidikan perlu dimaknai bahwa guru haruslah orang yang memiliki instink sebagai pendidik, mengerti dan memahami peserta didik. Guru harus menguasai

¹ Hamzah B. Uno, *Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 15.

² Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1, ayat 1, h. 2

secara mendalam minimal satu bidang keilmuan. Guru harus memiliki sikap integritas profesional.

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk: (1) meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran, dan (2) meningkatkan mutu pendidikan nasional. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (UU No 20 tahun 2003 pasal 3). Oleh karena itu, guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan.

Kedudukan guru dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai tenaga profesional dimaksud berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran, berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Yang dimaksud dengan guru sebagai agen pembelajaran (*learning agent*) adalah peran guru antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.

Kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Keempat kompetensi tersebut di atas bersifat holistik dan integratif dalam kinerja guru. Oleh karena itu, secara utuh sosok kompetensi guru meliputi (a) pengenalan peserta didik secara mendalam; (b) penguasaan bidang studi baik disiplin ilmu (*disciplinary content*) maupun bahan ajar dalam kurikulum sekolah (*pedagogical content*); (c) penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi proses dan hasil belajar, serta tindak lanjut untuk perbaikan dan pengayaan; dan (d) pengembangan kepribadian dan profesionalitas secara berkelanjutan.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia telah banyak dilakukan. Salah satu hal yang esensial dalam hal peningkatan kualitas pendidikan adalah mencetak para guru yang berkualitas pula. Oleh karena itu demi menghasilkan guru yang profesional maka perlu adanya pengembangan profesi bagi guru, yang dimulai sejak proses penyiapan tenaga guru hingga masa pengembangan karier guru (promosi).

Untuk menjadi guru profesional, perlu perjalanan panjang. Diawali dengan penyiapan calon guru, rekrutmen, penempatan, penugasan, pengembangan profesi dan karir, hingga menjadi guru profesional sungguhan, yang menjadi profesionalisasi secara terus menerus. Salah satu usaha yang dapat dilakukan secara institusi/kelembagaan dalam mempersiapkan guru profesional adalah program induksi bagi guru pemula. Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga telah mengatur Program Induksi Bagi Guru Pemula dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 27 Tahun 2010.

Sejalan dengan peraturan di atas Kementerian Pendidikan Nasional, melalui Proyek Bermutu Direktorat Tenaga Kependidikan menyusun dokumen-dokumen pendukung agar program induksi dapat berjalan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Dokumen yang disusun untuk mendukung pelaksanaan program induksi diantaranya adalah Panduan Kerja dan Modul. Program Induksi Guru Pemula (PIGP) bagi Pengawas Sekolah/ Madrasah, Kepala Sekolah/ Madrasah, dan Pembimbing.

Program induksi merupakan tahap penting dalam Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi seorang guru. Program Induksi Guru Pemula dapat juga dilaksanakan sebagai Program Induksi Guru Pemula Berbasis Sekolah, karena itu pelaksanaan yang baik haruslah

sistematis dan terencana berdasarkan konsep kerjasama dan kemitraan diantara para guru dalam pendekatan pembelajaran profesional.

Induksi merupakan proses pembelajaran profesional yang berlangsung paling tidak selama satu tahun dimana guru pemula belajar menyesuaikan diri dari pendidikan guru di sekolah atau dari tempat kerja lain untuk menjadi guru baik sebagai guru tetap, guru kontrak atau guru paruh waktu di sekolah. Induksi adalah proses pembelajaran untuk menjadi guru dan pembelajaran tentang profesi guru serta merupakan proses perkembangan kepribadian.

Program induksi dilaksanakan dalam rangka menyiapkan guru pemula agar menjadi guru profesional dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dengan demikian program induksi senantiasa dipantau dan dievaluasi agar dapat diperbaiki di masa depan. Pemantauan dan evaluasi sebagai salah satu bagian proses penjaminan mutu pendidikan terutama dalam pemenuhan standar kompetensi guru sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Selain itu, melalui program induksi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga dapat menunjang usaha peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan sekaligus memecahkan permasalahan

yang dihadapi dan dialami oleh guru pemula dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, peserta didik, kondisi sekolah, dan lingkungannya.

Konsep induksi sebagai sebuah sistem perlu mendapatkan pemikiran yang luas dari *stakeholder* pendidikan agar pada implementasinya dapat berjalan dengan baik. Hadirnya kebijakan yang menaungi sistem ini diharapkan dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaan induksi. Selain kebijakan perlu pula dukungan modul agar memudahkan guru pemula, kepala sekolah, pengawas sekolah, guru mentor, dan pihak lainnya memahami konsep induksi serta penilaiannya secara komprehensif.

Di Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan tempat untuk mengevaluasi program induksi bagi guru pemula. Terdapat banyak problematika yang terjadi dalam mengevaluasi program induksi. Seperti yang dilansir Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bidang Sumber Daya Manusia Retno Eka Wulandari, “Masih banyak masalah yang terjadi dalam pengevaluasian program induksi, diantaranya kurangnya sosialisasi pihak Dinas dan Suku Dinas, perubahan pengawas, kurangnya guru senior di sekolah, mata pelajaran yang tidak linear”.³

³ Wawancara dilaksanakan pada tanggal 5 April 2016 pukul 08.22.

Mengingat peran guru yang sangat strategis dalam pembangunan pendidikan, maka seorang guru harus dipersiapkan dengan matang. Persiapan tersebut haruslah berkesinambungan mulai dari *pre-service* dan pendidikan profesi guru di Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan sampai menjadi guru pemula di satuan pendidikan.

Bertitik tolak dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian terkait “Evaluasi Program Induksi bagi Guru pemula di Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta”

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya peningkatan kemampuan dan keterampilan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran.
2. Masih adanya guru yang belum melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan karakteristik mata pelajarannya.
3. Induksi bagi guru pemula belum dilaksanakan pada semua guru pemula untuk menjadi guru baik sebagai guru tetap, guru kontrak atau guru paruh waktu di sekolah.

C. Pembatasan Masalah

Batasan-batasan konseptual mencakup persoalan-persoalan esensial yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan program induksi bagi guru pemula meliputi: *context*, *input*, *process*, dan *product*.

Kemudian batasan objek penelitian dilaksanakan di Dinas Pendidikan Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang merupakan salah satu instansi yang menyelenggarakan program induksi bagi guru pemula. Batasan waktu penelitian dilakukan sejak bulan Maret 2016 hingga Juli 2016.

D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Evaluasi Program Induksi Bagi Guru Pemula di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Adapun Sub Fokus penelitian meliputi:

1. *Context* dalam program induksi meliputi: latar belakang program, tujuan dan sasaran program, dan tahapan kegiatan program
2. *Input* dalam program induksi meliputi: peserta induksi, pembimbing, kepala sekolah, pengawas sekolah
3. *Process* dalam program induksi meliputi: persiapan, pengenalan sekolah/madrasah dengan lingkungannya, pelaksanaan dan observasi pembelajaran, metode penilaian, evaluasi
4. *Product* dalam program induksi meliputi: pelaporan

E. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana komponen *context* pada program induksi di Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta?
2. Bagaimana komponen *input* pada program induksi bagi guru pemula?
3. Bagaimana komponen *process* pada program induksi bagi guru pemula?
4. Bagaimana komponen *product* pada program induksi bagi guru pemula?

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan Teoretis dan Praktis yang diuraikan di bawah ini :

1. Kegunaan Teoretis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam merumuskan program dan kebijakan oleh pengambil keputusan dan kebijakan dari pihak yang terkait dan kompeten.

2. Kegunaan Praktis :

Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi kepada Lembaga Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta maupun pihak-pihak terkait dalam melakukan perbaikan pelaksanaan program induksi bagi guru pemula.